

Strategi dan Tantangan: Kiprah TNI dalam Misi Perdamaian PBB

Arief Lassa Putra¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: arieflassa@gmail.com

Abstrak

Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi global, khususnya pemeliharaan perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi sorotan penting dalam konteks diplomasi dan keamanan internasional, di mana sejak bergabung dengan misi perdamaian PBB, TNI berkomitmen untuk menciptakan stabilitas di daerah konflik melalui penempatan pasukan di berbagai negara krisis. Para pendiri negara kita telah mencantumkan kewajiban Negara Republik Indonesia untuk turut serta menjaga ketertiban dunia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan TNI tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam pembangunan masyarakat, termasuk memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung proses rekonsiliasi. Dengan pelatihan dan pengalaman yang mumpuni, TNI membawa pendekatan berbasis nilai-nilai kemanusiaan, mengutamakan kerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional; keberadaan TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB mencerminkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global dan memperkuat citra negara di arena internasional. Selain itu, keterlibatan ini berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme TNI dan memperluas jaringan diplomasi pertahanan, di mana melalui berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, peran TNI tidak hanya berdampak pada pemulihan daerah konflik, tetapi juga menciptakan sinergi positif bagi perdamaian dan keamanan dunia, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang peduli dan bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas global.

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemeliharaan perdamaian.

Abstract

The role of the Indonesian National Army (TNI) in global missions, especially peacekeeping under the auspices of the United Nations (UN), has become an important highlight in the context of international diplomacy and security, where since joining the UN peace mission, the TNI is committed to creating stability in conflict areas through the deployment of troops in various crisis countries. The founding fathers of our country included the obligation of the Republic of Indonesia to participate in maintaining world order in the 1945 Constitution, and the TNI is not only tasked with maintaining security, but is also active in community development, including providing humanitarian assistance and supporting the reconciliation process. With extensive training and experience, the TNI brings a human values-based approach, prioritizing cooperation with other countries and international organizations; The presence of the TNI in UN peacekeeping missions reflects Indonesia's commitment to global stability and strengthens the country's image in the international arena. In addition, this involvement serves as a means to increase TNI professionalism and expand the defense diplomacy network, where through various challenges faced in the field, the TNI's role not only has an impact on the recovery of conflict areas, but also creates positive synergies for world peace and security, showing that Indonesia is a country that cares and is responsible for maintaining global stability.

Keywords: Indonesian National Army, United Nations, peacekeeping.



PENDAHULUAN

Sejarah gencatan senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC) dimulai dengan pidato bersejarah Lester B. Pearson, mantan Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri Kanada (1963-1968), di depan Majelis Umum (*General Assembly*) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2 November 1956, yang menyatakan bahwa untuk menjaga kesepakatan gencatan senjata dalam krisis Suez saat itu, diperlukan pembentukan “*a truly international peace and police force*”. Pearson diberi hadiah Nobel Perdamaian tahun 1957 karena keyakinannya akan pentingnya kekuatan perdamaian. Sejak tahun 1957, Indonesia telah terlibat aktif dalam misi-misi perdamaian PBB melalui Kontingen Garuda sebagai upaya melaksanakan misi global sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kontingen Garuda telah meninggalkan jejak kaki perdamaian di berbagai negara seperti Kongo (1961-1963), Vietnam (1973-1975), Irak (1989), Namibia (1989), Kuwait (1992), Kamboja (1993), Somalia (1993), Bosnia (1993-1996), Makedonia (1997), Slovenia (1997), Kroasia (1995), Mozambik (1994), Filipina (1999), Tajikistan (1998), Sierra Leone (1999), Nepal (2007), dan Darfur (2007). Saat ini, sekitar 1.800 personel TNI terlibat dalam enam misi perdamaian PBB di Haiti, Kongo, Sudan, Lebanon, Liberia, dan Sudan Selatan. Secara keseluruhan, Indonesia telah menyumbangkan puluhan ribu personel dalam 15 misi perdamaian PBB.

Partisipasi TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian ini tidak hanya mencerminkan peran strategis Indonesia di pentas global, tetapi juga memperkuat diplomasi pertahanan dan reputasi negara sebagai bagian dari solusi konflik internasional. Peran TNI dalam misi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengamanan wilayah konflik, perlindungan warga sipil, mendukung proses perdamaian, hingga memberikan bantuan kemanusiaan. Pengalaman dan kontribusi ini turut meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas pasukan TNI. Tantangan yang dihadapi oleh TNI dalam misi penjaga perdamaian PBB tidaklah sederhana. Kompleksitas konflik yang melibatkan berbagai aktor, kondisi geografis dan politik di lapangan, serta keterbatasan sumber daya seringkali menjadi hambatan yang harus dihadapi oleh pasukan Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana TNI berperan dalam misi global tersebut, baik dari segi operasional, diplomatik, maupun strategis. Pasukan penjaga perdamaian PBB saat ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang semakin meningkat karena misi mereka yang semakin kompleks dan kompleks. Selain mengawasi gencatan senjata, *buffer zone*, dan kawasan demiliterisasi dalam 16 operasi *peacekeeping*, termasuk di kawasan paling berbahaya seperti Sudan, Lebanon, Kongo, dan Haiti, pasukan ini juga terlibat dalam kebijakan dan pelatihan, pembersihan ranjau, tugas sebagai hakim dan penuntut umum, mengatur sistem kesehatan dan pendidikan, dan memastikan hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Didirikan pada tahun 1992, Departemen Operasi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (DPKO) didirikan untuk membantu negara-negara anggota dan Sekretaris Jenderal PBB menjaga perdamaian dan keamanan di seluruh dunia. Oleh karena itu, *UNPKO* telah menjadi instrumen utama PBB dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Namun, hanya sedikit perhatian yang diberikan untuk menilai alasan di balik partisipasi negara-negara dalam memberikan kontribusi pasukan bagi *UNPKO*. Dalam Piagamnya, PBB

menegaskan bahwa semua pihak berkomitmen untuk melestarikan dan mempertahankan perdamaian internasional.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk laporan resmi PBB dan publikasi tentang keterlibatan TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian. Metode studi pustaka dan analisis dokumen digunakan dalam pendekatan kualitatif.

PEMBAHASAN

PBB menciptakan metode untuk mengawasi dan menyelesaikan konflik bersenjata. Organisasi Pengawasan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTSO) adalah yang pertama kali dikirim ke Palestina pada tahun 1948 untuk memantau kesepakatan perang Israel-Arab. Langkah penting lainnya adalah pembentukan pasukan bersenjata PBB, *United Nations Emergency Force (UNEF)*, yang dikerahkan di Mesir pada 1956 setelah serangan *Anglo-French-Israeli. Peacekeeping* didasarkan pada lima prinsip utama: (1) operasi harus dilakukan oleh PBB, (2) memerlukan persetujuan pihak-pihak yang bertikai, (3) *peacekeepers* harus bersikap netral, (4) negara anggota harus berkomitmen menyediakan pasukan, dan (5) penggunaan kekuatan hanya boleh dilakukan seminimal mungkin, terutama dalam mempertahankan diri.

UN peacekeeping berperan penting dalam membantu negara yang terbelah oleh konflik untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Sebagai salah satu alat paling efektif PBB, *peacekeeping* mendukung negara-negara tuan rumah dalam transisi dari konflik menuju perdamaian. Dengan legitimasi internasional, berbagi beban, dan kemampuan untuk mengerahkan serta mempertahankan pasukan dari seluruh dunia, *UN peacekeepers* mengintegrasikan personel sipil dan militer guna melaksanakan mandat multidimensi. Selain menjaga keamanan, *peacekeeping* juga memfasilitasi proses politik, melindungi warga sipil, mendukung perlucutan senjata, pemilu, hak asasi manusia, dan penegakan hukum. Meskipun rintangan selalu ada, *peacekeeping* telah mencatat banyak keberhasilan selama lebih dari enam dekade, termasuk menerima *Nobel Peace Prize*.

Pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa berfungsi sebagai alat penting bagi masyarakat internasional dalam menangani konflik antara negara dan intra negara. Dengan legitimasi dan sifat universal yang unik, pasukan ini beroperasi berdasarkan mandat 193 negara anggota PBB, mencerminkan upaya keamanan kolektif. Indonesia, sebagai anggota PBB, berkomitmen untuk mengikuti tujuan dan prinsip dalam Piagam PBB, terutama dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia, dengan partisipasinya dalam operasi penjagaan perdamaian yang berlandaskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2007, TNI membentuk Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) di Kawasan *Indonesia Peace and Security Centre (IPSC)* Sentul, Bogor, yang bertugas menyiapkan calon Pasukan Perdamaian Indonesia, Kontingen Garuda. PMPP berfungsi merencanakan, menyiapkan, melatih, serta mengevaluasi pelaksanaan misi perdamaian, termasuk menyusun kebutuhan operasional, administrasi, dan logistik bagi prajurit TNI yang akan bertugas di berbagai negara dengan lingkungan, bahasa, dan budaya yang berbeda. Di sisi lain, Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan

Perdamaian (TKMPP) bertugas merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian dunia, berdasarkan kepentingan nasional.

TKMPP mengkoordinasikan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penghentian keikutsertaan Indonesia, menyiapkan kajian komprehensif dan rekomendasi kebijakan, serta merumuskan posisi dan strategi Indonesia dalam perundingan terkait. Selain itu, TKMPP juga memantau dan mengevaluasi partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia, untuk memajukan perdamaian dan menjaga keberlanjutan partisipasi Indonesia dalam misi-misi internasional tersebut. Kontingen Garuda yang bertugas di bawah bendera PBB, dikenal sebagai “*Blue Helmet/Blue Beret*”. Partisipasi Indonesia dalam misi-misi *UNPKO* telah mendapatkan pujian tinggi dari berbagai negara berkat profesionalisme dan kontribusinya. Saat ini, misi pasukan penjaga perdamaian PBB menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia.

Misi PBB adalah menciptakan dunia yang lebih aman dan adil, terutama bagi negara-negara yang dilanda perang, di mana perdamaian sangat dibutuhkan. Pasukan penjaga perdamaian PBB, yang terdiri dari tentara, polisi, dan personel sipil dari berbagai negara, berperan penting dalam memantau proses perdamaian serta mendukung implementasi kesepakatan damai. Selama lebih dari enam dekade, mereka telah berkontribusi dalam 172 penyelesaian konflik secara damai. Keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB merupakan mandat konstitusi yang harus direncanakan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh TNI untuk mewujudkan dunia yang lebih damai. Selain memenuhi kewajiban konstitusional, pengiriman tentara Indonesia dalam misi ini memiliki sejumlah manfaat. Pertama, pengalaman bertugas di medan operasi perdamaian akan meningkatkan kapabilitas dan kemampuan TNI dalam menghadapi tantangan keamanan di dalam negeri. Kedua, misi ini juga berfungsi sebagai ajang promosi alutsista dalam negeri, seperti panser Anoa yang digunakan oleh Kontingen Garuda di Lebanon, yang telah efektif dalam memasarkan produk industri pertahanan Indonesia di kancah internasional.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi pemeliharaan perdamaian di bawah PBB mencerminkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak 1957, Indonesia melalui Kontingen Garuda telah aktif berpartisipasi dalam lebih dari 15 misi, menunjukkan dedikasi terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. TNI tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga terlibat dalam pembangunan masyarakat dan bantuan kemanusiaan, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar misi penjaga perdamaian PBB yang mendukung perlindungan warga sipil dan proses politik. Meskipun dihadapkan pada tantangan kompleks, kontribusi TNI berperan penting dalam menciptakan sinergi positif bagi perdamaian dan keamanan dunia, menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang peduli dan bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban global. Namun, untuk mengemban misi perdamaian dunia dalam skala yang semakin besar, diperlukan arah yang jelas dalam partisipasi Indonesia, termasuk optimalisasi peran melalui pembentukan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP), komitmen pemerintah untuk meningkatkan

jumlah personel, serta pengiriman transportasi di misi pemeliharaan perdamaian. Oleh karena itu, *Peacekeeping Missions* menjadi faktor penting dalam menyusun strategi dan kebijakan luar negeri Indonesia, di mana pemerintah harus mengalokasikan sumber daya dan menentukan misi yang sejalan dengan kepentingan nasional. Melalui *review* terhadap pertahanan, partisipasi efektif di masa depan dapat terjamin, mengingat kontribusi terhadap *peacekeeping missions* mencerminkan pergeseran dalam kebijakan pertahanan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus BT Saragih. (2013, 11 September). "RI ready to deploy peace troops to Syria". Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-sends-helicopter-to-un-peacekeeping-mission-in-lebanon>
- Laura Neack. (1995, Mei). "UN Peace-Keeping: In the Interest of Community or Self?". Diakses pada 12 Oktober 2024, dari <https://www.jstor.org/stable/425066>
- Marrack Goulding. (1993, Juli). "The Evolution of United Nations Peacekeeping". Diakses pada 11 Oktober 2024, dari <https://www.jstor.org/stable/2622309>
- Sheany. (2018, 19 Agustus). "Indonesia Sends Helicopter to UN Peacekeeping Missions in Lebanon". Diakses pada 11 Oktober 2024, dari <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-sends-helicopter-to-un-peacekeeping-mission-in-lebanon>
- Suherdjoko. (2013, 27 April). "RI dispatches peacekeeping mission to Sudan". Diakses pada 13 Oktober 2024, dari <https://www.thejakartapost.com/news/2013/04/27/ri-dispatches-peacekeeping-mission-sudan.html>
- Verelladevanka Adryamarthanino, Widya Lestari Ningsih. (2022, 12 April). "Kontingen Garuda, Pasukan Perdamaian Indonesia". Diakses pada 11 Oktober 2024, dari <https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/12/120000279/kontingen-garuda-pasukan-perdamaian-indonesia>

